

**PENGARUH UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA
TIMUR**

Muhamad Khoirus Sholihin

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
khoirussholihin91@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur masih sangat perlu di perhatikan karena kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan actual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan negara maju. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data BPS Jawa Timur. Sedangkan metode pengambilan data menggunakan data BPS dan artikel-artikel yang bersangkutan dengan penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum (X1), Tingkat Pengangguran (X2) dan Jumlah Kemiskinan (Y). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan taraf signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi kemiskinan pada penduduk di Provinsi Jawa Timur antara lain adalah Upah Minimum (X1) yaitu tingkat signifikan (0,004) dan Jumlah Pengangguran (X2) yaitu tingkat signifikan (0,237). Sedangkan secara parsial variabel Jumlah Pengangguran (X2) dengan tingkat signifikan (0,237) tidak mempengaruhi variabel kemiskinan (Y). Selanjutnya variabel (X1) dan (X2) secara simultan mempengaruhi variabel kemiskinan (Y).

Kata kunci: *Upah Minimum, Tingkat Pengangguran, Jumlah Kemiskinan, Provinsi Jawa Timur.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan actual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, melainkan negara maju. Di Indonesia kemiskinan masih merupakan masalah yang perlu di atasi bersama tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi yakni mencapai 16,58 persen pada tahun 2001. Namun dalam beberapa tahun terakhir persentase kemiskinan di Indonesia cenderung menurun di setiap tahunnya di mana pada tahun 2001 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 16,58 persen. Kemudian pada tahun 2008 sedikit mengalami penurunan menjadi 15,42 persen. Penurunan ini terus terjadi

hingga tahun 2018 di mana persentase kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 10,96 persen (Sumber: *Badan Pusat .Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*)

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena masyarakat itu sendiri yang kurang produktif .dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga susah untuk keluar dari kemiskinan. Dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan jumlah penduduk di Jawa Timur dimana tahun 2008 sebesar 19.223.833 jiwa, jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 penduduk Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 39.272.972 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar 40.020.001 jiwa. Sumber dilihat dari tabel Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS).

Kebijakan upah minimum juga .berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan .dikembangkan sejak awal tahun 1970- an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003 h. 23).

Ketika upah riil .berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekuatan upah riil mengurangi tingkat perolehan kerja dan mempertinggi pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh kekuatan upah dan penajatan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Ketika pemerintah .mempertahankan agar upah tidak mencapai tingkat keseimbangan maka dapat menimbulkan kekakuan upah. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur cenderung turun selama tahun 2008-2018. Di mana tahun 2008 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur sebesar 237.061 jiwa, jumlah ini turun menjadi 211.356 jiwa pada tahun 2009, penurunan ini disebabkan oleh adanya pembukaan lapangan pekerjaan di sektor swasta seperti perusahaan listrik, industri serta sektor pemerintahan seperti pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Jawa Timur meningkat 173.624 jiwa, dan hingga tahun 2017 yaitu jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur tercatat 147.031 jiwa. Terjadi fluktuasi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur salah satunya disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja sehingga masyarakat yang terpaksa harus menganggur.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang yang mencakup bukan hanya komponen upah tetapi juga lembur dan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk tunjangan hari raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin (Badan Pusat Statistik). Secara umum sistem upah menurut Gilaso (2003, .h..5-6) adalah sebagai berikut: 1) Upah Menurut Prestasi (upah potongan). Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan jika hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dan lain-lain. 2) Upah Waktu, Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu

pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. 3) Upah Borongan. Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain 4) Upah Premi, Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi "normal" berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi "Premi". Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan time and motion study (waktu dan studi gerak). 5) Upah Bagi Hasil. Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih dan direksi sebuah PT mendapat tantieme (bagian laba yang diberikan pemegang saham) bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan 6) Upah pegawai Negeri. Upah Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip yaitu pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

Pengangguran

Pengangguran, dibedakan dalam dua pengertian. Pengangguran terselubung atau tersembunyi. Pengangguran musiman. Pengangguran terselubung atau tersembunyi biasanya diartikan sebagai golongan tenaga kerja yang produktivitas marjinalnya adalah nol atau sangat rendah, sehingga walaupun mereka berkerja, usaha tersebut tidak akan menaikkan tingkat produksi. Sedangkan pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu, yaitu pada bulan-bulan dimana kegiatan pertanian atau kegiatan produksi lainnya lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan masa-masa lainnya (Sukirno 2007 h. 69) Menurut Sumarsono (2003, h. 4) pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacah dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan orang yang bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu sebelum hari pencacahan dinyatakan sebagai bekerja.

Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno, (2006 h...328-331) jenis-jenis pengangguran dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya a. Pengangguran Friksional, adalah pengangguran normal yang terjadi jika ada 2 -3 persen maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. b. Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran. Yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja. c. Pengangguran Struktural, adalah pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan. d. Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri 1. Pengangguran Berdasarkan Cirinya a. Pengangguran musiman adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya. b. Pengangguran terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja. c. Pengangguran

tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien. d. Setengah menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari) disebut underemployment.

Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas 2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Indikator Kemiskinan

Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kolori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek material saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non material. Dengan demikian mengukur kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala yang pada dasarnya bersifat multi-faset atau integratetd proverty. Jadi kemiskinan bukan hanya memiliki suatu dimensi yang bersifat moneteris saja, melainkan juga dimensi non moneteris (Adisasmita. 2005, h. 193).

Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Menurut OBPS (2013, h. 97) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya pangan dan gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan minyak dan lemak dan lain lain.

Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin. Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD 2 per orang per hari. Kategori kemiskinan menurut BPS dapat dilihat beberapa aspek diantaranya berikut: 1. lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang 2. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8.m² per orang 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga

tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m² buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,-.per bulan. 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2004 h. 157) terdapat .tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia Kualitaas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

C. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Kerangka Konseptual Pada bab ini akan dijelaskan kerangka konsep penelitian, hipotesis penelitian dan definisi oprasional Kerangka konsep penelitian akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Dengan demikian krangka konsep diperlukan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan suatu penelitian yang dikembangkan dari tinjauan teori sehingga mudah dipahami. Gambaran mengenai variabel penelitian dapat diperoleh melalui kerangka konsep, yang dikategorikan kedalam kelompok dependent, independent dan confounding. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan sementara peneliti yang akan diuji kebenarannya yang dinyatakan di hipotesis alternatif, sebagai suatu petunjuk dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan suatu hasil. Definisi oprasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari variabel yang diteliti untuk memperjelas maksud dari penelitian yang dilakukan.

D. PEMBAHASAN HASIL

Analisis Regresi linier Berganda Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada keterangan ini: Regresinya sebagai berikut: $Y = 25,308 - 0,515 X_1 + 0,356 X_2$. Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Nilai konstanta sebesar 25,308 nilai konstanta ini menyatakan bahwa apabila variabel bebas yakni UMP dan jumlah pengangguran sama dengan nol, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 25,308 persen. 2. Koefisien regresi variabel UMP (X_1) sebesar - 0,515/ artinya bahwa setiap kenaikan UMP 1 persen maka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menurun sebesar 0,515. persen.. 3. Koefisien regresi variabel pengangguran (X_2) sebesar 0,356 yang berarti bahwa setiap kenaikan jumlah

pengangguran 1 persen maka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 0,356 persen. Pengujian Hipotesis Uji Signifikansi (t) Berdasarkan keterangan, variabel UMP (.X1) diperoleh nilai $t\text{-hitung} < -1,860$ pada $\alpha 0,05$ dengan derajat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,04 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa secara parsial variabel UMP (.X1) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan tingginya tingkat upah mendorong tenaga kerja untuk menerima pekerjaan yang tawarkan perusahaan karena mereka menganggap upah yang diberikan mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kemudian variabel pengangguran diperoleh nilai $t\text{-hitung} > 1,860$, pada $\alpha 0,5$ dimana signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($0,235 > 0,05$). Maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Artinya bahwa secara parsial variabel pengangguran tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh pengangguran yang terjadi di Provinsi Jawa Timur hanya bersifat musiman bukan pengangguran permanen b. Uji Simultan (F), Uji signifikansi (f) Uji F ini digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model ini yakni Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis nilai F hitung b. Dependent Variable.: Y menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,945 yang artinya bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas yakni UMP dan jumlah pengangguran dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 94,5 persen. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien determinasi R Adjusted, sebesar 0,867, hal ini mengandung arti bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 86,7.. persen dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP). dan pengangguran dan sisanya sebesar 13,3 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel UMP (.X1.) diperoleh nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ yakni ($-4,082 < -1,860$) pada $\alpha 0,05$. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa secara parsial variabel UMP (.X1.) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Kemudian variabel pengangguran diperoleh nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. yakni sebesar $1,278 > 1,860$. Pada $\alpha 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa secara parsial variabel pengangguran tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. b. Hasil Uji.F menunjukkan bahwa nilai F hitung 33,741 dan F-tabel 4,46 jadi $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti bahwa kedua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model ini yakni Upah Minimum Provinsi Jawa Timur dan pengangguran secara bersama-sama (serempak) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur c. Nilai koefisien determinasi R Adjusted, sebesar 0,867 artinya bahwa pengangguran di Provinsi Jawa Timur sebesar 86,7.persen dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (.UMP) dan pengangguran dan sisanya sebesar 13,3. persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan dan tingkat upahnya dinaikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi pekerja. Karena diharapkan dengan upah minimum yang ada di suatu daerah dapat melindungi para pekerjanya dari kemiskinan, karena dengan upah minimum seorang pekerja menerima upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak serta dapat terhindar dari garis kemiskinan. Upah minimum Kota/Kabupaten tiap tahunnya naik sesuai dengan

kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah. 2. Untuk mengurangi tingkat pengangguran pemerintah dan pihak yang terkait diharapkan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah memberikan izin pendirian usaha agar nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2005). Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2011). Survei Tenaga Kerja Nasional. Jakarta.. 2013. Statistik Indonesia: Statistical Year book of Indonesia. BPS. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2004). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas. Jakarta.
- Gilarso. (2003). Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Kanisius. Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal. (2013). Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Edisi Kedua. Bumi Aksara Jakarta.
- Husaini, Usman. et.al (2006). Pengantar Statistik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Istifaiyah. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbang kertosusila Tahun (2009- 2013.)). Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Jhingan0,M.L. (2007). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.Edisi Ke enambelas. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga. Jakarta.
- Mahyudi, Ahmad. (2004). Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mankiw, N.Gregory. (2006). Pengantar Ekonomii Makro. Edisi -3. Selemba Empat Jakarta.
- Maulana, Hafihz. (2013). Evaluasi Kinerja Ekonomi Aceh. <http://www.academia.edu> (diakses Juni 2014)
- Prastyo. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007) Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rivai, dkk. (2014). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Jurnal. Vol . 1 No. 2 Oktober 2014,
- Siregar, Hermanto. (2009) Makro-mikro Pembangunan. IPB Pres. Kampus IPB Dermaga Bogor. Indonesia.
- Sukirno Sadono. (2006). Makro Ekonomi Modern. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumarsono Sonny. (2003). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Penerbit Graha Ilmu. Jember.
- Sumarsono Sonny, (2003). Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Supranto, (2004). Statistik. Edisi Keenam. Erlangga. Jakrta.
- Tadoro dan Smith (2006). Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga. Edisi Sembilan Erlangga. Jakarta
- Tambunan Tulus T.H. (2012). Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.Gralia Indones